DIGITAL GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM BOLATA YASSIBERRUI DI KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Muhammad Nabil Aliah
NPP. 33.0937
Program Studi Studi Kebijakan Publik
Email: muhammadnabilaliah@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. H. Murtir Jeddawi, S.H., S.Sos., M.Si
Email: murtirjeddawi15@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *The implementation of the Bolata Yassiberrui program as a manifestation of the One Data Indonesia policy in Barru Regency faces various obstacles, including low participation of Regional Apparatus Organizations (OPD) in providing data, limited human resource capacity, and minimal community participation. The Barru Regency's SPBE Index score of only 2.79 indicates weak digital governance in the region.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the implementation of digital governance in the Bolata Yassiberrui program, identify the obstacles encountered, and formulate solutions to strengthen the program's digital governance.* ***Method:*** *This research employs a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews with 10 informants (Head of Communication and Informatics Office, portal admin, representatives from BPS, Bapenda, BPKAD, Bappeda, and 4 community members), direct observation, and document analysis. Data analysis used the Miles & Huberman interactive model, framed by the OECD (2019) Digital Governance theory encompassing three dimensions: Data as a Strategic Asset, Inclusive Governance, and Citizen-Centric Services.* ***Result:*** *The findings indicate that digital governance implementation is not yet optimal. In the data as a strategic asset dimension, data availability only reaches 60% with low quality (minimal metadata) and manual interoperability. In the inclusive governance dimension, regulations without strict sanctions cause weak coordination and minimal public participation. In the citizen-centric services dimension, data is only used for planning, not for direct public services, and data is often outdated.* ***Conclusion:*** *This study concludes that the implementation of digital governance in the Bolata Yassiberrui program in Barru Regency is not yet effective. It is recommended that the local government immediately revise the regulation (Perbup No. 8/2020) to include sanctions and incentives, enhance human resource capacity sustainably, optimize public participation through massive socialization, and develop an API for automatic data exchange.*

Keywords: *Barru Regency, Bolata Yassiberrui, Digital Governance, One Data Indonesia, Policy Implementation.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/*Research Gap*): Penulis berfokus pada permasalahan implementasi Program Bolata Yassiberrui sebagai wujud kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Barru yang menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya partisipasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyediakan data, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta minimnya partisipasi masyarakat. Nilai Indeks SPBE Kabupaten Barru yang hanya 2,79 mengindikasikan lemahnya tata kelola digital di daerah tersebut, sementara studi-studi sebelumnya masih jarang yang membedah secara mendalam dinamika operasional program data terpadu di tingkat kabupaten. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi digital governance dalam program Bolata Yassiberrui di Kabupaten Barru. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap 10 informan (Kepala Dinas Kominfo, admin portal, perwakilan BPS, Bapenda, BPKAD, Bappeda, dan 4 masyarakat), observasi langsung, serta studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman dengan kerangka teori Digital Governance dari OECD (2019) yang mencakup tiga dimensi. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi digital governance belum optimal. Pada dimensi data sebagai aset strategis, ketersediaan data baru 60% dengan kualitas rendah (minim metadata) dan interoperabilitas manual. Pada dimensi tata kelola inklusif, regulasi tanpa sanksi tegas menyebabkan koordinasi lemah (tingkat kehadiran rapat hanya 50%) dan partisipasi publik minim. Pada dimensi layanan berorientasi masyarakat, data hanya digunakan untuk perencanaan (bukan layanan publik langsung), inovasi sudah mengurangi duplikasi data namun belum efisien karena menciptakan pekerjaan ganda, serta kapasitas SDM menjadi kendala utama karena tidak semua OPD memiliki pranata komputer. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi digital governance dalam program Bolata Yassiberrui di Kabupaten Barru belum berjalan dengan efektif. Adapun saran penelitian ini yakni perlunya merevisi Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2020 dengan menambahkan klausul sanksi administratif dan insentif, meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan rutin dan pembentukan tim helpdesk, mengoptimalkan sosialisasi dan fitur umpan balik di portal, serta mengembangkan API untuk pertukaran data otomatis.

Kata kunci: Barru, Bolata Yassiberrui, Digital Governance, Implementasi Kebijakan, Satu Data Indonesia.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Data merupakan elemen fundamental yang menjadi dasar seluruh proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan layanan. Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) untuk menjawab persoalan fragmentasi dan rendahnya kualitas data pemerintah. Perpres ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan tata kelola data yang terpadu, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah Kabupaten Barru meluncurkan sebuah inovasi bernama Bolata Yassiberrui pada 23 Juni 2021. Dalam bahasa Bugis, istilah ini secara harfiah berarti Rumah Data yang Terintegrasi. Keberadaan Bolata Yassiberrui didukung dengan landasan hukum berupa Peraturan Bupati Barru Nomor 8 Tahun 2020 tentang Satu Data Terpadu Daerah. Tujuan hadirnya Bolata Yassiberrui adalah

untuk mengintegrasikan seluruh data pemerintah kabupaten dalam satu tempat yang bisa diakses baik untuk pemerintah maupun masyarakat.

Namun, dalam praktiknya implementasi program tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Indeks SPBE Kabupaten Barru yang hanya 2,79 (berada di ambang batas bawah predikat "Baik"), serta temuan bahwa hanya sekitar 60% OPD yang aktif mengunggah data secara berkala. Banyak OPD yang belum memahami standar metadata, sehingga data yang sama dari OPD berbeda sering kali angkanya tidak sinkron. Interoperabilitas data juga masih rendah karena sebagian besar data masih diunggah secara manual, belum melalui sistem otomatis (API). Selain itu, partisipasi masyarakat masih minim karena sosialisasi yang belum massif.

.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (*Research Gap*)

Penulis berfokus pada permasalahan implementasi Program Bolata Yassiberrui yang belum optimal di Kabupaten Barru. Kesenjangan yang diisi oleh penelitian ini adalah kesenjangan kontekstual (*contextual gap*). Studi-studi terdahulu tentang Satu Data Indonesia dan *digital governance* masih didominasi oleh analisis pada level makro (kebijakan nasional) atau berfokus pada institusi pusat, sementara penelitian yang menyelami secara mendalam dinamika operasional program data terpadu di tingkat kabupaten, khususnya di wilayah Indonesia Timur seperti Kabupaten Barru, masih sangat terbatas.

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan implementasi program ini. Pertama, rendahnya partisipasi OPD dalam menyediakan data, dengan hanya sekitar 60% OPD yang aktif mengunggah data. Kedua, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, di mana tidak semua OPD memiliki pegawai fungsional pranata komputer. Ketiga, minimnya partisipasi masyarakat akibat sosialisasi yang kurang masif. Keempat, kelemahan regulasi karena Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 belum mengatur sanksi tegas bagi OPD yang lalai maupun insentif bagi yang patuh.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting mengingat masih sangat terbatasnya kajian yang secara mendalam membedah dinamika operasional program data terpadu di tingkat kabupaten. Penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai implementasi *digital governance* dalam Program Bolata Yassiberrui di Kabupaten Barru sebagai dasar perumusan strategi oleh pemerintah setempat dalam penguatan tata kelola data di tengah berbagai tantangan seperti rendahnya partisipasi OPD, keterbatasan SDM, dan minimnya partisipasi masyarakat. Apabila penelitian ini tidak dilaksanakan, maka pemerintah dan pemangku kebijakan akan kekurangan dasar empiris yang kuat dalam memahami pola serta tingkat implementasi *digital governance* secara faktual, sehingga perumusan strategi pengembangan program berisiko tidak tepat sasaran, kurang efektif, dan tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Akibatnya, upaya penguatan tata kelola data melalui Program Bolata Yassiberrui dapat berjalan kurang optimal, bahkan berpotensi stagnan.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks *digital governance*, kebijakan Satu Data Indonesia, maupun implementasi platform data terpadu. Adinegoro et al. (2025) mengkaji kebijakan Satu Data Indonesia menggunakan pendekatan *literature review* dan menemukan bahwa implementasi SDI justru menimbulkan masalah baru seperti beban anggaran dan rendahnya interoperabilitas. Irawan (2025) meneliti implementasi SDI di Provinsi Banten

menggunakan metode kualitatif dengan teori Edward III, menemukan bahwa kendala utama terletak pada sumber daya manusia (tidak ada fungsional statistisi) dan struktur birokrasi (belum ada SOP dan sanksi). Setyawati (2023) meneliti *digital governance* dalam keterbukaan informasi di Setjen DPR RI menggunakan studi kasus kualitatif, menemukan bahwa kendala utama adalah belum adanya kebijakan digital yang eksplisit. Karinda et al. (2024) meneliti potensi dan tantangan *digital governance* di tingkat lokal di Sulawesi Tengah menggunakan metode riset online, menemukan bahwa tantangan utama adalah akses infrastruktur digital yang terbatas dan keterampilan digital SDM yang rendah. Arifin (2025) meneliti digitalisasi pelayanan publik terpadu di Kabupaten Serang (aplikasi "Serang TATU") menggunakan studi kasus kualitatif, menemukan tantangan berupa infrastruktur jaringan, literasi digital, dan ego sektoral antar OPD.

Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan dominasi metode kualitatif dengan beragam pendekatan teoritis, namun masih jarang yang secara khusus membedah implementasi *digital governance* dalam konteks program data terpadu di tingkat kabupaten dengan fokus pada koordinasi antar OPD, kapasitas SDM, dan partisipasi publik secara simultan.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada beberapa aspek. Pertama, dari segi konteks objek penelitian, penelitian ini difokuskan pada implementasi Program Bolata Yassiberrui di Kabupaten Barru, yang merupakan program inovasi data daerah di wilayah Indonesia Timur dengan karakteristik sosial-budaya dan tantangan spesifik yang berbeda dari lokus penelitian sebelumnya. Kedua, teori yang digunakan adalah kerangka *Digital Governance* dari OECD (2019) yang mencakup tiga dimensi (Data sebagai Aset Strategis, Tata Kelola Inklusif, dan Layanan Berorientasi Masyarakat), yang belum banyak digunakan dalam penelitian sejenis di tingkat kabupaten di Indonesia. Ketiga, penelitian ini mengintegrasikan analisis terhadap aspek regulasi (termasuk kelemahan Perbup yang tidak mengatur sanksi), kapasitas SDM (minimnya pranata komputer di OPD), interoperabilitas teknis (belum adanya API), dan partisipasi publik dalam satu kerangka analisis yang utuh.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai implementasi *digital governance* dalam Program Bolata Yassiberrui di Kabupaten Barru.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan penelitian untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi *digital governance* dalam konteks alamiahnya, terutama ketika batasan antara fenomena dan konteksnya tidak jelas (Creswell & Poth, 2018). Desain studi kasus dipilih karena memungkinkan penulis menyelidiki suatu fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata secara mendalam (Yin, 2018).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan terhadap 10 informan yang dipilih secara *purposive sampling* berdasarkan kriteria keterlibatan langsung, keahlian, dan perspektif yang beragam. Informan tersebut terdiri dari Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Barru (selaku koordinator program), admin portal Bolata Yassiberrui, perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Barru, perwakilan Dinas

Pendapatan Daerah (Bapenda), perwakilan BPKAD, Kepala Bappeda, serta 4 orang masyarakat (pengguna portal yang diperoleh melalui teknik *snowball sampling*). Kombinasi informan ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang utuh dari sisi kebijakan, pelaksana teknis, produsen data, dan penerima manfaat.

Observasi dilakukan terhadap proses input data oleh OPD, antarmuka portal, rapat koordinasi, serta interaksi pengguna dengan portal. Studi dokumentasi dilakukan terhadap Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2020, SK Bupati No. 291/2025, dokumen SOP, laporan kinerja Dinas Kominfo, serta statistik penggunaan portal.

Teknik pengujian keabsahan data kualitatif dilakukan melalui uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas data dijaga melalui triangulasi sumber (membandingkan informasi dari berbagai informan), triangulasi teknik (membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi), serta *member check* kepada informan untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi sebenarnya.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles & Huberman (2014) yang meliputi tiga tahap: reduksi data (seleksi dan pengkodean data berdasarkan dimensi teori), penyajian data (dalam bentuk narasi deskriptif dan matriks), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan lokus utama di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Barru sebagai pengelola portal Bolata Yassiberrui. Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih tiga minggu, yaitu pada bulan Januari 2026, yang mencakup proses observasi awal, pelaksanaan wawancara mendalam, serta pengumpulan dokumentasi kegiatan program.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis implementasi *digital governance* dalam Program Bolata Yassiberrui di Kabupaten Barru menggunakan kerangka teori dari OECD (2019) yang mencakup tiga dimensi, yaitu: (1) Data sebagai Aset Strategis, (2) Tata Kelola Inklusif, dan (3) Layanan Berorientasi Masyarakat.

3.1. Data sebagai Aset Strategis

Penulis melakukan analisis terhadap dimensi data sebagai aset strategis melalui empat indikator: ketersediaan data, kualitas data, interoperabilitas data, dan keamanan data.

Ketersediaan Data: Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Barru diungkapkan bahwa, "Sebenarnya portal sudah berjalan sejak 2021. Tapi baru sekitar 60% dari total OPD yang aktif mengunggah data secara berkala. Beberapa OPD masih mengirim data dalam bentuk PDF atau Excel lewat WhatsApp, bukan diunggah langsung ke portal." Hasil dokumentasi pada portal menunjukkan bahwa dari 512 dataset yang tersedia, beberapa OPD seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan belum menginput satu pun data. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan data belum optimal seperti yang dimandatkan pada Perbup No. 8 Tahun 2020.

Kualitas Data: Dari sisi kualitas, ditemukan bahwa tidak semua data yang tersedia dilengkapi dengan metadata yang sesuai standar Perpres No. 39 Tahun 2019. Wawancara dengan pegawai BPS Kabupaten Barru mengungkapkan, "Kami di BPS sudah terbiasa dengan standar metadata. Tapi OPD

lain banyak yang belum paham. Akibatnya, data yang sama dari OPD berbeda kadang angkanya berbeda." Hasil observasi pada portal menunjukkan bahwa metadata belum lengkap, pada bagian deskripsi data, tags, kode, dan link metadata belum tersedia.

Interoperabilitas Data: Berdasarkan observasi teknis, portal Bolata Yassiberrui belum sepenuhnya mendukung otomatisasi pertukaran data antar OPD. Sebagian besar data masih diunggah secara manual. Hasil wawancara dengan pegawai Bapenda mengungkapkan, "Kami setiap bulan punya data pajak daerah. Idealnya data itu langsung terintegrasi ke portal secara otomatis. Tapi sekarang, staf kami harus mengupload ulang secara manual. Ini memakan waktu dan rawan kesalahan."

Keamanan Data: Dari aspek keamanan, Dinas Kominfo telah menerapkan sistem autentikasi dengan akun dan kata sandi untuk setiap OPD. Wawancara dengan admin portal menyatakan, "Kami sudah menggunakan enkripsi SSL, jadi format link nya sudah HTTPS. Namun backup data rutin setiap minggunya masih dilakukan secara manual dan untuk sertifikasi keamanan data yang lebih tinggi, kami masih terkendala anggaran." Dengan demikian, sistem keamanan sudah cukup baik namun masih perlu ditingkatkan ke arah sertifikasi standar internasional (ISO 27001).

3.2. Tata Kelola Inklusif

Penulis melakukan analisis terhadap dimensi tata kelola inklusif melalui empat indikator: kebijakan dan regulasi, kepemimpinan dan koordinasi, akuntabilitas dan transparansi, serta partisipasi publik.

Kebijakan dan Regulasi: Secara legalistik, Kabupaten Barru telah memiliki landasan hukum yang kuat (Perbup No. 8 Tahun 2020 dan SK Bupati No. 291/2025). Namun hasil wawancara dengan pegawai BPKAD mengungkapkan, "Sampai saat ini belum ada insentif bagi OPD yang aktif. Yang aktif ya karena kesadaran sendiri. Saya rasa perlu ada untuk memotivasi." Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa dalam Perbup No. 8 Tahun 2020, BAB XII sudah mengatur terkait insentif namun belum dilaksanakan, dan belum ada pengaturan sama sekali terkait sanksi bagi OPD yang tidak aktif.

Kepemimpinan dan Koordinasi: Koordinasi antar OPD dilakukan melalui Forum Satu Data Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan dijadwalkan setiap tiga bulan. Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kominfo menyatakan, "Komitmen pimpinan daerah sebenarnya ada, tapi di level teknis, data sering dianggap urusan tambahan." Dari hasil dokumentasi rapat koordinasi, ditemukan bahwa tingkat kehadiran OPD hanya sekitar 50% (17 orang dari total OPD). Ironisnya, meskipun sudah ada komitmen bersama yang telah ditandatangani oleh 48 pejabat OPD, implementasinya belum optimal.

Akuntabilitas dan Transparansi: Portal Bolata Yassiberrui telah menyediakan fitur unduh data secara gratis dan tanpa registrasi untuk publik dalam bentuk Excel, PDF, dan CSV. Namun, mekanisme pelaporan keluhan atau umpan balik dari masyarakat belum tersedia secara eksplisit di portal. Wawancara dengan admin portal mengungkapkan, "Belum ada. Saat ini masyarakat hanya bisa menghubungi kami via telepon atau WhatsApp."

Partisipasi Publik: Partisipasi masyarakat dalam program ini masih sangat rendah. Hasil wawancara dengan 4 masyarakat menunjukkan bahwa 3 dari mereka tidak mengetahui portal ini dari sosialisasi resmi pemerintah. Salah seorang masyarakat mengatakan, "Tidak tahu. Saya baru dengar sekarang. Tidak pernah ada sosialisasi dari pemerintah." Hal ini bertolak belakang dengan dokumentasi yang menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan sosialisasi melalui media surat kabar, media online, media sosial, dan radio. Rendahnya partisipasi publik disebabkan karena sosialisasi belum masif dan berkelanjutan.

3.3. Layanan Berorientasi Masyarakat

Penulis melakukan analisis terhadap dimensi layanan berorientasi masyarakat melalui empat indikator: layanan berbasis data, inovasi dan efisiensi, dampak sosial, serta kapasitas kelembagaan.

Layanan Berbasis Data: Sejauh ini, pemanfaatan data dari portal masih terbatas pada kebutuhan perencanaan pembangunan oleh Bappeda. Hasil wawancara dengan Kepala Bappeda mengungkapkan, "Ya, kami menggunakan. Tapi belum sepenuhnya. Kami masih sering meminta data langsung ke OPD karena data di portal kadang tidak update atau tidak lengkap." Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa data yang tersedia belum sepenuhnya update, bahkan data yang baru diupload di tahun 2026 adalah data dari tahun 2024.

Inovasi dan Efisiensi: Dari sisi inovasi, keberadaan Bolata Yassiberrui telah mengurangi duplikasi data antar OPD. Namun efisiensinya belum maksimal karena setiap OPD masih perlu mengupload data ke databasenya masing-masing. Wawancara dengan Kepala Bappeda mengungkapkan, "Sebagian. Kami hemat waktu untuk mengumpulkan data. Tapi karena integrasi belum otomatis, efisiensinya belum maksimal."

Dampak Sosial: Dampak sosial yang paling terasa adalah peningkatan transparansi. Masyarakat dapat mengunduh data APBD, data penduduk, dan data statistik lainnya. Berdasarkan dokumentasi, jumlah pengguna yang mengakses portal cukup tinggi. Namun tingkat kepuasan masyarakat masih sulit diukur karena belum ada survei kepuasan pengguna.

Kapasitas Kelembagaan: Kapasitas SDM menjadi tantangan terbesar. Tidak semua OPD memiliki pegawai fungsional pranata komputer untuk bidang teknologi informasi. Wawancara dengan pegawai Bapenda mengungkapkan, "Pernah (pelatihan). Tapi terakhir itu empat tahun lalu. Pelatihan hanya sehari. Setelah itu, jika ada masalah teknis, kami bingung harus tanya siapa." Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa pelatihan operator portal terakhir dilaksanakan pada tahun 2022, artinya sudah 4 tahun tidak ada pelatihan berkelanjutan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Program Bolata Yassiberrui bertujuan untuk mewujudkan tata kelola data yang terpadu di Kabupaten Barru. Penulis menemukan temuan penting bahwa implementasi *digital governance* belum optimal karena adanya kesenjangan antara mandat regulasi dan realitas di lapangan. Sama halnya dengan temuan Irawan (2025) bahwa kendala utama implementasi Satu Data Indonesia terletak pada sumber daya manusia (tidak ada fungsional statistisi) dan struktur birokrasi (belum ada sanksi), penelitian ini juga menemukan bahwa tidak adanya sanksi tegas dalam Perbup dan minimnya pranata komputer di OPD menjadi hambatan utama.

Berbeda dengan temuan Arifin (2025) yang meneliti aplikasi "Serang TATU" dan menemukan bahwa ego sektoral antar OPD menjadi tantangan utama, penelitian ini menemukan bahwa selain ego sektoral, faktor yang tidak kalah penting adalah belum adanya API (Application Programming Interface) untuk pertukaran data otomatis, sehingga setiap OPD harus melakukan dobel pekerjaan (upload manual ke portal selain mengelola database internal mereka). Temuan ini memperkuat temuan Karinda et al. (2024) bahwa tantangan utama *digital governance* di tingkat lokal adalah keterampilan digital SDM pemerintah yang masih rendah dan akses infrastruktur yang terbatas.

Sementara itu, temuan penelitian ini menolak asumsi bahwa keberadaan regulasi yang lengkap menjamin implementasi yang efektif. Meskipun Kabupaten Barru telah memiliki Perbup No. 8 Tahun 2020 dan SK Bupati No. 291/2025, implementasi tetap tidak optimal karena tidak adanya mekanisme penegakan (sanksi) dan insentif. Hal ini berbeda dengan temuan Setyawati (2023) yang menemukan bahwa kendala utama adalah belum adanya peraturan eksplisit (*digital policy*). Dalam kasus Barru, peraturan sudah ada namun lemah dalam aspek penegakan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini mengkonfirmasi bahwa keberhasilan implementasi *digital governance* sangat bergantung pada tiga faktor kunci yang saling terkait: (1) kualitas regulasi (termasuk mekanisme sanksi dan insentif), (2) kapasitas SDM digital yang berkelanjutan, dan (3) interoperabilitas teknis (API) yang memungkinkan otomatisasi pertukaran data.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan beberapa temuan menarik lainnya yang tidak secara langsung masuk ke dalam tiga dimensi utama namun penting untuk dicatat. Pertama, faktor penghambat partisipasi OPD tidak hanya bersifat teknis tetapi juga kultural. Banyak OPD yang masih menganggap data sebagai "milik" instansinya masing-masing, bukan sebagai aset publik yang harus dibagikan. Kedua, faktor pendidikan dan kesempatan menjadi kendala dalam pemanfaatan media digital untuk pengembangan literasi data, sama halnya dengan temuan Suwana & Lily (2017). Ketiga, ditemukan bahwa komitmen bersama yang telah ditandatangani oleh 48 pejabat OPD bersifat simbolis tanpa mekanisme monitoring dan evaluasi yang jelas. Keempat, program ini belum didukung oleh alokasi anggaran khusus untuk pengembangan interoperabilitas (API) dan sertifikasi keamanan data (ISO 27001) akibat kebijakan efisiensi anggaran.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa implementasi *digital governance* dalam Program Bolata Yassiberrui di Kabupaten Barru belum berjalan dengan efektif. Hal ini terlihat dari tiga dimensi kerangka OECD (2019) yang semuanya belum optimal. Pada dimensi data sebagai aset strategis, ketersediaan data baru 60% dengan kualitas rendah (minim metadata), interoperabilitas masih manual, dan keamanan data belum tersertifikasi. Pada dimensi tata kelola inklusif, kebijakan dan regulasi sudah ada namun belum mengatur sanksi dan insentif belum dilaksanakan, kepemimpinan dan koordinasi lemah (tingkat kehadiran rapat hanya 50%), akuntabilitas dan transparansi sudah cukup baik namun belum ada fitur umpan balik, serta partisipasi publik sangat minim. Pada dimensi layanan berorientasi masyarakat, layanan berbasis data masih terbatas dengan data yang sering tidak update, inovasi dan efisiensi belum maksimal, dampak sosial positif namun belum terukur, dan kapasitas SDM menjadi kendala utama karena pelatihan tidak berkelanjutan dan minimnya pranata komputer di OPD.

Guna meningkatkan implementasi *digital governance* dalam program Bolata Yassiberrui, disarankan untuk merevisi Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2020 dengan menambahkan klausul sanksi administratif dan insentif, meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan rutin setiap tiga bulan dan pembentukan tim teknis *helpdesk*, mengoptimalkan partisipasi publik melalui sosialisasi massif dan penambahan fitur umpan balik di portal, serta mengembangkan API untuk otomatisasi pertukaran data dan mengalokasikan anggaran untuk sertifikasi keamanan data.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang relatif singkat (tiga minggu) sehingga tidak dapat menangkap dinamika program dalam periode yang lebih panjang. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kabupaten saja (studi kasus tunggal) sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi ke daerah lain dengan karakteristik berbeda.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi yang sama setelah implementasi rekomendasi kebijakan (revisi Perbup, pengembangan API, pelatihan berkelanjutan) untuk mengukur efektivitasnya. Penelitian komparatif dengan kabupaten/kota lain di

Sulawesi Selatan juga direkomendasikan untuk menemukan faktor-faktor kunci keberhasilan implementasi *digital governance* di tingkat lokal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bapak Syamsuddin, S.IP., M.Si selaku Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Barru beserta jajarannya (khususnya Irgi Adam, S.Stat) yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk melaksanakan penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pemerintah kabupaten yang terlibat dalam penelitian ini, serta seluruh masyarakat yang telah bersedia menjadi informan. Tak lupa, terima kasih kepada Dosen Pembimbing, Bapak Prof. Dr. H. Murtir Jeddawi, S.H., S.Sos., M.Si., atas bimbingannya selama proses penyusunan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Adinegoro, B., Fuad, M., Ruhuputy, A., Pambudi, I., & Arrahman, T. (2025). Kebijakan Satu Data Indonesia: Sebuah Antitesis Semangat Keterbukaan dan Informasi Publik. *Jurnal Kebijakan Publik*, 16, 1-11.

Anggraini, D., Sudirman, F. A., Atnan, N., & Husain, M. N. (2025). E-Government Utilization and The Political Logic of Network Governance in Indonesia's Local Administration. *Wacana Politik*, 10(1). https://journals.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/62691

Arifin, Z., Subagja, I. K., & Hakim, A. (2025). Digital Governance: Studi Kasus Digitalisasi Pelayanan Publik Terpadu di Kabupaten Serang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 1-19.

Effendi, L. M. (2022). Upaya perubahan struktur organisasi pemerintah daerah Kabupaten Bandung dalam menciptakan kualitas pelayanan publik. *Jurnal Media Birokrasi*, 51–66. https://ejournal.ipdn.ac.id/JMB/article/download/2745/1357

Hakim, L., Adiarsa, S. R., & Ema. (2024). Structuration in implementing Satu Data Indonesia policy in local government. *5th Borobudur International Symposium on Humanities and Social Science (BIS-HSS) 2023*. https://doi.org/10.31603/bishss.105

Irawan, S., Handayani, R., & Publik, A. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di Pemerintah Provinsi Banten. *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(1), 1-16.

Kannapadang, D., Munawaroh, S., & Purwanto, S. A. (2025). Optimizing E-Government for Enhanced Transparency and Accountability in Local Governance. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan*, 13(5), 4203-4218.

Kusworo, H., Prabowo, H., Sinaga, O., & Rumbekwan, M. (2021). Participatory Planning in Collaborative Governance Perspective in Banyumas Regency, Central Java Province, Indonesia. *Repository Institut Pemerintahan Dalam Negeri*. http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/779

Mahadevi, A. (2026). Analysis of the Implementation of the One Data Indonesia Policy: Case Studies of The Bandung and Kuningan Regency Governments. *Journal of Science and Education (JSE)*, 6(2), 1288-1304. http://repository.upnvj.ac.id/42677/

Maulana, R. Y., Durnik, M., & Decman, M. (2024). Collaborative Approach on Digital Government Transformation: In-Depth Analysis from Expert Interview. *NISPAcee Journal of Public Administration and Policy*, 17(1), 94-119. https://doi.org/10.2478/nispa-2024-0005

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Moenek, R., & Suwanda, D. (2019). *Good Governance: Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. ISBN 978-602-446-368-7.

OECD. (2019). *The Path to Becoming a Data-Driven Public Sector*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/059814a7-en

Peraturan Bupati Barru Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Satu Data Terpadu Daerah. (2020). Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 8.

Peraturan Bupati Barru Nomor 291/DISKOMINFOSP/VI/2025 tentang Aplikasi Bolata Yassiberrui sebagai Portal Satu Data Tingkat Kabupaten Barru. (2025).

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. (2019). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112.

Rahmadani, R. G., Nurhayati, O. D., & Nugraheni, D. M. K. (2025). Oriented Enterprise Architecture for Enhancing Digital Governance and Technopreneurship in Regional Governments. *Aptisi Transactions on Technopreneurship (ATT)*, 7(3), 942–956. https://doi.org/10.34306/att.v7i3.769

Rifa'i, B. (2024). Institutional Dimensions in Open Government Data: A Deep Dive Into Indonesia's Satu Data Initiative and Its Implications for Developing Countries. *International Journal of Public Administration*. https://doi.org/10.1080/15309576.2024.2377609

Saritka, I. (2024). Collaborative Governance Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Daerah (JIAPD) IPDN*, 84. https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/4864

Singgir, N. Y., Ferriswara, D., Pramudiana, I. D., & Kamariyah, S. (2025). Policy Implementation in Indonesia: A Systematic Review of Recent Trends and Practices in Public Administration and Governance. *Kajian Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 120–148. https://doi.org/10.62383/kajian.v2i3.574

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sumarno, D. A. (2025). *Collaborative Governance Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 Di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri). http://eprints.ipdn.ac.id/23428/

Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications